



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUGROHO**
2. Jabatan : **INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN APARATUR**
3. NHK : **274051**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **361.992.000**

1. Tanah Seluas 1755 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 175.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/150 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 36.492.000
3. Tanah Seluas 182 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 836 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **328.500.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, WARISAN Rp. 11.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH JEEP/MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
4. MOBIL, KIARIO MINIBUS Tahun 2012, WARISAN Rp. 105.000.000
5. MOBIL, DAIHATSU TAFT MINIBUS Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **83.000.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **31.439.735****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----**



Sub Total	Rp.	804.931.735
III. HUTANG	Rp.	170.244.880
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	634.686.855

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.